

# PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL: ANALISIS EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN DI DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE

*Financial Management of Social Assistance Programs: Examining Budget Effectiveness and Transparency at the Parepare City Social Affairs Office*

Salwa Tahta Aunia Sudirman<sup>1</sup>, Syarifuddin Yusuf<sup>2</sup>, Fitriyani Syukri<sup>3</sup>

Email: [shalwatahtaa@gmail.com](mailto:shalwatahtaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [yusufsyarif64@gmail.com](mailto:yusufsyarif64@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[fitriyanisyukri19@gmail.com](mailto:fitriyanisyukri19@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

<sup>3</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan  
Kode Pos 91131

## Abstrak

Tata kelola keuangan program bantuan sosial (bansos) merupakan aspek krusial dalam menjamin efektivitas dan transparansi penyaluran anggaran publik. Kajian ini menganalisis tata kelola keuangan program bansos pada Dinas Sosial Kota Parepare dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan dan transparansi anggaran. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, penyebaran kuesioner, serta telaah dokumen kebijakan dan laporan keuangan terkait. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga permasalahan utama dalam pengelolaan bansos. Pertama, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang disebabkan oleh lemahnya proses validasi dan pemutakhiran data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun pendataan lokal. Kedua, keterlambatan pencairan bantuan yang dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga yang belum berjalan secara optimal. Ketiga, keterbatasan transparansi informasi publik, di mana meskipun Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) telah diterapkan, akses informasi dan tingkat literasi digital penerima manfaat masih relatif rendah. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa perencanaan berbasis dokumen kinerja, adopsi sistem informasi pengelolaan bansos, serta pelibatan masyarakat melalui musyawarah kelurahan dalam proses validasi data. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi utama meliputi penguatan pemutakhiran data berbasis data governance, penetapan service level agreement (SLA) pencairan dengan mitra perbankan, penerapan prinsip open data secara minimal, serta penguatan kanal pengaduan masyarakat berbasis multi-saluran. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas program bansos tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh kualitas data, koordinasi kelembagaan, dan transparansi proses pengelolaan.

**Kata Kunci:** Bantuan Sosial, Pengelolaan Keuangan Publik, Efektivitas Program, Transparansi Anggaran, DTKS

## Abstract

*Financial governance of social assistance programs plays a crucial role in ensuring the effectiveness and transparency of public budget allocation. This study examines the financial governance of social assistance programs at the Social Affairs Office of Parepare City, with a particular focus on budget effectiveness and transparency. A qualitative case study approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observations, questionnaires, and document analysis of relevant policies and financial reports. The findings identify three major challenges in social assistance governance. First, inaccuracies in beneficiary targeting were largely caused by weak data validation and updating processes within the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and local data collection systems. Second, delays in fund disbursement occurred due to insufficient coordination among involved institutions. Third, limitations in public information transparency persisted; although the Social Welfare Information System–Next Generation (SIKS-NG) has been implemented, public access to information and beneficiaries' digital literacy remain relatively low. Conversely, several supporting factors were identified, including performance-based planning documents, the adoption of information systems in social assistance management, and community involvement through sub-district deliberation forums for data validation. Based on these findings, key recommendations include strengthening data updating mechanisms through a data governance framework, establishing service level agreements (SLAs) for fund disbursement with*

*partner banks, implementing minimum open data practices, and enhancing multi-channel grievance and complaint systems. These findings contribute empirical evidence that the effectiveness of social assistance programs is determined not only by the size of the allocated budget, but also by data quality, inter-institutional coordination, and process transparency.*

**Keywords: Social Assistance, Public Financial Management, Program Effectiveness, Budget Transparency; DTKS**

## PENDAHULUAN

Kelurahan Terdapat banyak, daftar penerima bantuan sosial (bansos) yang ditempel di papan pengumuman sering memantik dua pertanyaan sederhana namun krusial: sudah tepatkah sasaran, dan seberapa transparankah aliran dananya? Pertanyaan ini relevan bukan saja karena besarnya dana publik yang digelontorkan, tetapi juga karena mandat moral pengelolaan keuangan negara untuk mencapai kemanfaatan setinggi-tingginya bagi warga rentan. Pada level nasional, pemerintah menargetkan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) Rp479,1 triliun pada 2023 dan meningkat menjadi Rp496,8 triliun dalam APBN 2024 porsi yang besar dan strategis untuk meredam kerentanan serta menjaga daya beli masyarakat. (Kementerian Keuangan RI, 2023; Sri Mulyani, 2024).

Konteks Parepare memperlihatkan urgensi itu pada skala daerah. BPS Kota Parepare mencatat penduduk miskin Maret 2023 sebanyak 7,98 ribu jiwa (5,34%), menunjukkan bahwa intervensi perlindungan sosial tetap menjadi instrumen kunci pengentasan kemiskinan lokal. Pada saat yang sama, kebijakan dan arsitektur data penerima bansos sedang bertransformasi: Permensos 3/2025 menegaskan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis pemutakhiran dan penggunaan data untuk bansos dan program kesejahteraan sosial, mencabut Permensos 3/2021 tentang pengelolaan DTKS. Perubahan regulasi ini menggeser “tulang punggung” tata kelola data dari DTKS menuju DTSEN yang terintegrasi lintas-lembaga, sehingga mengangkat standar baru ketepatan sasaran dan akuntabilitas bagi pemerintah daerah, termasuk Dinas Sosial. (Kementerian Sosial RI, 2025; JDIH BPK RI, 2025; Setkab, 2025).

Di lapangan, Dinas Sosial Kota Parepare telah mengadopsi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai perangkat kerja untuk pendataan dan verifikasi sejalan dengan kebijakan nasional namun temuan penelitian tingkat kota mengindikasikan kesenjangan implementasi: validasi data penerima yang belum merata, keterlambatan pencairan, serta keterbatasan transparansi informasi publik di tingkat kelurahan. Kendala literasi digital sebagian penerima juga membatasi pemanfaatan kanal daring untuk mengecek status bantuan atau menyampaikan pengaduan. Temuan tersebut mempertegas bahwa efektivitas bansos tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga mutu tata kelola data, koordinasi antarlembaga, dan praktik transparansi yang inklusif. Sementara itu, literatur tata kelola fiskal menegaskan bahwa transparansi keuangan public ketersediaan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu merupakan prasyarat peningkatan akuntabilitas dan kinerja layanan. (World Bank, 2011).

Secara empiris, sejumlah pemantauan masyarakat sipil selama periode pandemi hingga pascapandemi juga mendokumentasikan kerapuhan integritas data dan risiko salah sasaran dalam penyaluran bansos, sehingga memperkuat argumen bahwa penguatan data governance dan keterbukaan informasi harus berjalan beriringan dengan digitalisasi sistem. (*Transparency International Indonesia & koalisi*, 2021). Di sisi kebijakan, penggunaan SIKS-NG/DTKS (dan kini DTSEN) menyediakan kerangka teknis untuk pemutakhiran data by name by address, tetapi efektivitas dan transparansi sangat bergantung pada mutu eksekusi di tingkat daerah: prosedur verifikasi lapangan, kepatuhan pada standar dokumentasi, kedisiplinan pelaporan, serta ketersediaan kanal aduan yang mudah diakses kelompok rentan. (Permensos 3/2021; Kemensos SIKS-NG).

Berangkat dari latar tersebut, artikel ini memfokuskan lensa pada Dinas Sosial Kota Parepare untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) seberapa efektif pengelolaan keuangan program bansos dalam memenuhi indikator ketepatan sasaran, waktu, jumlah, dan administrasi; dan (2) seberapa transparan praktik penyajian dan diseminasi informasi anggaran serta penyaluran kepada publik. Dengan desain studi kasus kualitatif, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, kuesioner, dan telaah dokumen resmi kemudian dianalisis secara tematik dan didukung tabulasi deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan konteks kelembagaan sekaligus pengalaman penerima manfaat pada tingkat mikro.

Meskipun literatur tata kelola keuangan publik telah banyak membahas transparansi dan akuntabilitas program perlindungan sosial secara umum, kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi efektivitas dan transparansi bansos pada kota menengah di Indonesia dengan mempertimbangkan dinamika transisi regulasi dari DTKS ke DTSEN,

keterbatasan literasi digital penerima, serta variasi kapasitas kelembagaan daerah masih sangat terbatas. Sebagian besar studi terdahulu berfokus pada program nasional secara agregat atau pada kota besar, sehingga menyisakan kesenjangan bukti empiris pada konteks kota menengah seperti Parepare yang menghadapi tantangan tersendiri dalam hal integrasi data, koordinasi lintas lembaga, dan inklusivitas akses informasi publik. Studi ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan studi kasus kualitatif yang mendalam.

Kontribusi dan arah pembahasan. Artikel menawarkan tiga kontribusi. Pertama, pemetaan bukti lapangan tentang faktor pengungkit dan penghambat efektivitas (khususnya kualitas data dan koordinasi) pada konteks kota menengah. Kedua, penilaian operasional transparansi apa yang telah dibuka, bagaimana kanal informasi/aduan bekerja, dan seberapa inklusif aksesnya. Ketiga, rekomendasi kebijakan yang menyelaraskan tuntutan regulasi baru (DTSEN) dengan kapasitas daerah (SDM, proses, dan infrastruktur digital). Alur naskah disusun sebagai berikut: bagian Metode menjelaskan desain dan teknik pengumpulan/analisis data; Hasil menyajikan temuan terkait efektivitas dan transparansi, termasuk ringkas tabel indikator layanan; Pembahasan menautkan temuan dengan kerangka *public financial management* dan literatur transparansi; dan Kesimpulan merumuskan implikasi praktis berupa penguatan data governance, service level agreement (SLA) pencairan, dan transparansi proaktif berbasis data agregat serta kanal aduan multi-saluran.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan komponen kuantitatif deskriptif yang terbenam (*embedded*). Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah proses pengelolaan keuangan bansos secara mendalam dalam konteks kelembagaan yang nyata (Dinas Sosial Kota Parepare) dan menjawab pertanyaan “bagaimana” serta “mengapa” kebijakan dan praktik berjalan sebagaimana adanya (Thomas, 2021). Untuk memperkuat temuan kualitatif, unsur kuantitatif deskriptif dari kuesioner digunakan untuk memetakan persepsi penerima dan menampilkan pola dasar (frekuensi, proporsi) sejalan dengan prinsip *mixed methods* yang menekankan kesesuaian pendekatan dengan tujuan penelitian (Creswell & Creswell, 6th ed.).

Kasus yang ditelaah adalah pengelolaan keuangan program bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Parepare. Unit analisis meliputi proses (perencanaan–penetapan–penyaluran–pelaporan), dokumen (SOP, SK, daftar KPM, rekap penyaluran), pelaksana (pimpinan, pejabat teknis, petugas lapangan), dan penerima manfaat. Informan ditetapkan secara *purposive* berdasarkan peran strategis dan pengalaman pada pengelolaan bansos, dilengkapi *snowball* untuk menjangkau narasumber lapangan. Komposisinya: informan utama (Kepala Dinas Sosial; Kepala Seksi Bansos) dan informan pendukung (3 petugas lapangan, 5 penerima manfaat berbagai skema, 2 auditor internal/eksternal) total 12 orang sebagaimana dirangkum pada karakteristik informan penelitian.

Wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan utama dan pendukung untuk menelisik pengalaman, kendala, dan praktik pengelolaan ( $\pm 45$ –90 menit per sesi; direkam/ditulis dengan izin). 2) Observasi non-partisipatif pada proses pendataan–verifikasi–penyaluran untuk menangkap alur kerja, *bottleneck*, serta pola koordinasi antarpihak. 3) Kuesioner singkat kepada penerima manfaat untuk memotret persepsi atas ketepatan sasaran/waktu/jumlah/administrasi dan akses informasi/kanal aduan; hasilnya diolah secara deskriptif (tabulasi frekuensi, persentase). 4) Telaah dokumentasi (SOP, SK penetapan, daftar KPM per kelurahan/kecamatan, berita acara, laporan realisasi) guna memvalidasi narasi dan angka yang muncul dalam wawancara/observasi. Seluruh prosedur ini mengikuti rancangan penelitian pada naskah sumber.

Data kualitatif dianalisis menggunakan *Reflexive Thematic Analysis* (RTA) dengan tahapan: (a) *familiarization* (membaca berulang transkrip/catatan), (b) pengodean awal berbasis makna, (c) konstruksi tema dari pola antarkode, (d) peninjauan dan pemurnian tema, (e) pendefinisian/penamaan tema, dan (f) penulisan temuan dengan ilustrasi kutipan. RTA dipilih karena selaras dengan tujuan memahami proses dan pengalaman kebijakan secara kontekstual, serta memberi ruang reflektivitas peneliti dalam membangun makna (Braun & Clarke, 2022; Kiger & Varpio, 2020). Untuk memperkuat ketertelusuran, proses pengodean mengikuti kaidah *first-cycle/second-cycle coding* yang terdokumentasi dalam *coding log* dan *analytic memo* (Saldaña, 2021). Data kuesioner diolah deskriptif guna memberi konteks kuantitatif (frekuensi/persentase) yang ditautkan ke tema kualitatif pada tahap integrasi.

Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber (pimpinan, pelaksana, penerima, auditor) dan triangulasi metode (wawancara–observasi–kuesioner–dokumen). Peneliti melakukan peer debriefing dan audit trail untuk menajamkan interpretasi. Pada fase awal, sebagian transkrip dikodekan oleh dua peneliti untuk menyelaraskan kode dan memperkaya definisi kode, dengan keputusan akhirnya dicapai lewat konsensus, sejalan dengan perdebatan kontemporer tentang posisi *intercoder reliability* pada riset kualitatif (O’Connor & Joffe, 2020). Integrasi QUAL→quan dilakukan melalui narasi terpadu dan tabel/grafik deskriptif sehingga angka memperjelas konteks

tematik (Creswell & Creswell, 6th ed.).

Seluruh partisipan memberikan persetujuan berinformasi, identitas disamarkan, dan data dikelola secara aman. Rujukan etik nasional yang digunakan adalah Peraturan BRIN No. 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset, sebagai pedoman pengujian keberterimaan etik di Indonesia; prinsip-prinsipnya diadopsi dalam desain, pengumpulan, dan pelaporan data.

Kombinasi studi kasus kualitatif yang mendalam dengan dukungan deskriptif kuantitatif dianggap paling sesuai karena: (i) topik menyoal proses dan praktik lintas actor bukan sekadar *outcome* sehingga membutuhkan eksplorasi kontekstual (Thomas, 2021); (ii) sasaran kajian adalah efektivitas dan transparansi, yang banyak bergantung pada pengalaman, koordinasi, dan tata kelola, sehingga tema-tema hasil RTA relevan untuk memetakan penguangkit/penghambat; dan (iii) tabulasi deskriptif dari kuesioner membantu menampilkan skala/pola persepsi penerima tanpa kehilangan kedalaman kualitatif. Kerangka ini juga konsisten dengan rancangan awal penelitian pada naskah sumber (wawancara–observasi–kuesioner–dokumentasi; analisis tematik dan deskriptif).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Analisis berfokus pada dua dimensi utama efektivitas dan transparansi dengan sumber data berupa wawancara mendalam (12 informan kunci dan pendukung), observasi proses pendataan verifikasi penyaluran, kuesioner singkat penerima, serta telaah dokumen resmi (SOP, SK, rekap penyaluran). Temuan inti menunjukkan: (i) ketidaktepatan sasaran akibat pemutakhiran/validasi data yang belum merata; (ii) keterlambatan pencairan karena koordinasi lintas-pihak belum sinkron; dan (iii) transparansi yang belum inklusif akses informasi publik tidak merata dan literasi digital sebagian penerima terbatas. Di sisi lain, ada faktor pendukung seperti perencanaan berbasis dokumen kinerja, adopsi SIKS-NG, dan pelibatan masyarakat dalam musyawarah kelurahan untuk validasi.

#### 1) Efektivitas pengelolaan keuangan bansos

##### a. Ketepatan sasaran.

Wawancara petugas lapangan dan penerima mengindikasikan *mismatch data*: warga layak belum terdaftar sementara sebagian yang tidak memenuhi kriteria masih tercatat. Mekanisme verifikasi sering bersifat administratif (berkas) tanpa pemeriksaan lapangan yang memadai. Kutipan representatif: “Masih banyak warga yang harusnya dapat bantuan, tapi tidak masuk data karena belum diperbarui” (petugas lapangan). “Kadang verifikasi hanya dilakukan di atas kertas, bukan langsung ke lapangan” (kepala seksi). Temuan ini menegaskan kebutuhan pemutakhiran data yang lebih sering dan mekanisme *spot-check* lapangan.

##### b. Ketepatan waktu.

Penyaluran kerap terlambat. Faktor dominan meliputi sinkronisasi data yang belum tuntas saat penyaluran, proses perbankan, dan koordinasi dengan pemerintah kelurahan. Kutipan penerima: “Bantuan sering terlambat. Warga sudah menunggu tapi belum ada pencairan dari bank.” Dampak langsungnya: penerima kesulitan merencanakan pengeluaran rumah tangga, dan efektivitas program menurun.

##### c. Ketepatan jumlah & administrasi.

Variasi kelengkapan dokumen dan kendala teknis pendataan berdampak pada akurasi besaran bantuan dan dokumentasi tanda terima. Validasi administratif tanpa verifikasi lapangan memperbesar peluang kesalahan.

#### 2) Transparansi anggaran dan penyaluran

##### a. Keterbukaan informasi.

Walau SIKS-NG telah diadopsi, akses publik atas informasi kunci (daftar KPM, jadwal pencairan, status bantuan) belum merata. Observasi menunjukkan di sejumlah kelurahan tidak tersedia papan informasi dan warga tidak mengetahui kanal resmi pengecekan status. Kutipan warga: “Kami tidak tahu siapa saja yang dapat bantuan. Tidak ada pengumuman yang jelas di kelurahan.”

##### b. Sosialisasi prosedur dan hak penerima.

Sebagian penerima belum memahami prosedur, hak, dan kewajiban, termasuk prasyarat PKH. Literasi digital membatasi pemanfaatan kanal daring. Kutipan: “Kalau ada keluhan harus ke mana? Kami tidak tahu.”

##### c. Kanal pengaduan dan partisipasi.

Musyawarah kelurahan dimanfaatkan untuk validasi data, namun pengaduan belum berjalan optimal dan tidak familier bagi kelompok rentan/lanjut usia. Partisipasi publik pasca-validasi relatif terbatas.

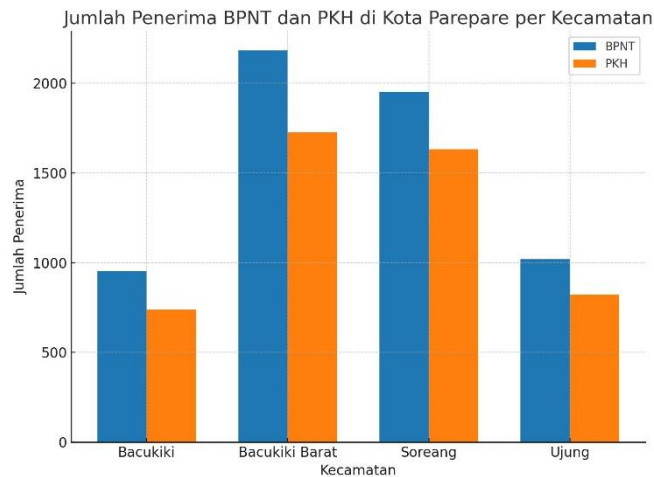
## 3) Penerima manfaat (KPM) BPNT dan PKH (Januari–Maret, periode penelitian)

**Tabel 1. Rekap penerima BPNT & PKH per kecamatan serta kontribusinya ke total kota**

Kecamatan	BPNT	PKH	Total	Kontribusi ke total kota
Bacukiki	954	738	1.692	15,3%
Bacukiki Barat	2.183	1.726	3.909	35,4%
Soreang	1.954	1.634	3.588	32,5%
Ujung	1.021	824	1.845	16,7%
Total Kota	6.112	4.922	11.034	100%

Sumber: data diolah tahun 2025

Secara agregat, BPNT 55,4% dan PKH 44,6% dari total KPM. Pada seluruh kecamatan, porsi BPNT lebih besar ( $\pm 54,5-56,4\%$ ). Bacukiki Barat berkontribusi terbesar (35,4%) terhadap total KPM kota, disusul Soreang (32,5%). Pada level kelurahan, Bukit Harapan (Soreang) tercatat tertinggi (1.152 KPM), sedangkan Mallusetasi (Ujung) terendah (55 KPM). Data rinci per kelurahan tersedia pada tabel sumber penelitian.


**Gambar 1. Pola perbandingan KPM BPNT vs PKH per kecamatan (deskripsi)**

Secara konsisten, BPNT > PKH di semua kecamatan (rasio  $\pm 1,20-1,29$ ). Pola ini mencerminkan cakupan BPNT yang lebih luas (ketahanan pangan), sedangkan PKH lebih selektif karena prasyarat bersyarat (ibu hamil, balita, anak sekolah, disabilitas berat).

## 4) Skema dan besaran bantuan yang berjalan

**Tabel 2. Ringkasan skema bansos dan nilai bantuan yang teridentifikasi dalam data**

Sumber	Program/Kategori	Bentuk & Besaran Bantuan	Frekuensi
Pemda	Anak yatim piatu	Rp600.000	per triwulan
Pemda	Penyandang disabilitas	Rp1.500.000 per orang; bantuan alat bantu (nilai bervariasi)	sesuai ketentuan
Pemda	Keluarga fakir miskin	Rp1.500.000	per bulan
Pemda	Lanjut usia	Rp1.500.000 per orang; peralatan jadi Rp900.000 per orang	sesuai ketentuan
Nasional	PKH (umum)	Rp200.000	per bulan
Nasional	PKH (ibu hamil/balita)	Rp3.000.000	per tahun
Nasional	PKH pendidikan (SD/SMP/SMA)	Rp900.000/1.500.000/2.000.000	per tahun
Nasional	BPNT/Rastra	Beras kualitas medium 6 kg/KPM	per bulan

Sumber: data diolah tahun 2025

Keterangan: angka merefleksikan paket/klaim besaran pada periode dan dokumen penelitian; implementasi aktual mengikuti ketentuan teknis Kementerian Sosial/Pemda.

5) Faktor pendukung dan penghambat (ringkas)

Pendukung: (i) perencanaan berbasis RPJMD/RKPD/Renja; (ii) adopsi SIKS-NG; (iii) pelibatan masyarakat dalam validasi (musyawarah kelurahan). Penghambat: (i) integrasi data pusat-daerah belum mulus; (ii) SDM lapangan terbatas; (iii) birokrasi pencairan dan koordinasi dengan bank/kelurahan belum seragam; (iv) literasi digital penerima dan sosialisasi belum merata; (v) kanal aduan belum familier/inklusif.

6) Tabel temuan tematik (kutipan kunci)

**Tabel 3. Ringkasan tema dan kutipan perwakilan dari wawancara/observasi**

Tema	Sub-tema	Kutipan singkat
Efektivitas	Ketepatan sasaran	“Masih banyak warga yang harusnya dapat bantuan, tapi tidak masuk data...” (petugas lapangan)
Efektivitas	Ketepatan waktu	“Bantuan sering terlambat... belum ada pencairan dari bank.” (penerima)
Transparansi	Keterbukaan info	“Kami tidak tahu siapa saja yang dapat bantuan... tidak ada pengumuman yang jelas.” (penerima)
Transparansi	Kanal aduan	“Kalau ada keluhan harus ke mana? Kami tidak tahu.” (penerima)

Sumber: data diolah tahun 2025

7) Inti temuan sebagai landasan pembahasan

- a. Efektivitas belum optimal: terjadi mismatch data dan keterlambatan pencairan; verifikasi kerap administratif, belum sistematis di lapangan.
- b. Transparansi belum inklusif: akses informasi publik (daftar KPM, jadwal, status, dan kanal aduan) belum seragam antar-kelurahan; literasi digital membatasi pemanfaatan SIKS-NG.
- c. Distribusi KPM: total 11.034 keluarga; BPNT 55,4% dan PKH 44,6%; kontribusi terbesar Bacukiki Barat (35,4%), terendah Bacukiki (15,3%); ketimpangan antar-kelurahan cukup lebar (mis. Bukit Harapan tertinggi 1.152 vs Mallusetasi 55).
- d. Skema bantuan: kombinasi bansos daerah (yatim, disabilitas, fakir miskin, lansia) dan program nasional (PKH, BPNT) berjalan, tetapi konsistensi informasi dan dokumentasi publik perlu diperkuat.
- e. Faktor sistemik: integrasi data, kapasitas SDM, dan koordinasi lintas-pihak merupakan pengungkit sekaligus titik rawan yang menentukan kualitas pengelolaan.

**Pembahasan**

**Menautkan temuan dengan kerangka tata kelola.**

Hasil penelitian menegaskan bahwa kualitas tata kelola data, koordinasi antarpelaksana, dan transparansi proses merupakan tiga tuas utama yang menentukan mutu pengelolaan keuangan bansos. Empat indikator efektivitas tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi berkelindan dengan keterbukaan informasi publik dan keberfungsian kanal aduan. Dengan kata lain, besaran anggaran tidak otomatis berbanding lurus dengan dampak jika fondasi data dan akuntabilitas informasi belum kokoh. Bukti paling kuat muncul dari ketidaksesuaian data penerima (*mismatch*), keterlambatan pencairan, serta akses informasi yang belum merata di tingkat kelurahan meski SIKS-NG telah diadopsi. Temuan ini menjadi pijakan untuk membaca ulang praktik di Parepare melalui lensa *public financial management* dan *social accountability*, seraya menyoroti kesenjangan antara desain prosedural dan realitas operasional lapangan.

1) Dimensi efektivitas: dari “empat tepat” ke “satu ekosistem”

- a) Tepat sasaran: masalah data bukan sekadar teknis, melainkan tata kelola.

Ketidaktepatan sasaran warga layak belum terdaftar dan penerima tidak layak masih tercatat menunjukkan bahwa pemutakhiran dan validasi data berjalan timpang. Proses verifikasi yang dominan administratif (berkas) tanpa *spot-check* lapangan yang konsisten membuka ruang bias dan kesalahan kategorisasi. Secara praktis, ini menandakan kebutuhan arsitektur data berlapis: (i) desk verification berbasis sistem; (ii) verifikasi lapangan berbasis komunitas (RT/RW/tokoh lokal) dengan sampel berkala; dan (iii) data audit triwulanan untuk menyinkronkan perubahan status sosial rumah tangga (lahir, meninggal, migrasi, perubahan kerja). Pendekatan berlapis ini menyasar akar masalah (*governance*), bukan hanya gejala (entri data).

- b) Tepat waktu: *bottleneck* koordinasi dan keuangan mikro rumah tangga.

Keterlambatan pencairan berdampak langsung pada kemampuan KPM merencanakan pengeluaran harian menurunkan utility bantuan. Rantai kritisnya terletak pada sinkronisasi data akhir, proses perbankan, dan koordinasi kelurahan. Solusi operasional yang realistis adalah SLA pencairan dengan bank penyalur, cut-off sinkronisasi data yang jelas setiap periode, serta alert otomatis ketika dokumen belum lengkap sebelum tanggal H-X. Di tingkat kelurahan, checklist pra-pencairan mengurangi rework administratif.

- c) Tepat jumlah & tepat administrasi: kontrol dokumen dan jejak audit.
 

Variasi kelengkapan dokumen dan kendala teknis berimplikasi pada akurasi besaran bantuan dan potensi *error* pencatatan. Diperlukan daftar kendali (*control list*) yang seragam, bukti penerimaan digital terarsip, serta *three-way matching* sederhana (daftar KPM bukti bank berita acara). Langkah ini meningkatkan *traceability* dan menutup celah sengketa.
- 2) Dimensi transparansi: dari “ada sistem” ke “akses yang bermakna”
  - a) Ketersediaan ≠ keterjangkauan.
 

Adopsi SIKS-NG belum otomatis bermakna bagi penerima jika akses dan literasi terbatas. Observasi memperlihatkan ketiadaan papan informasi di sejumlah kelurahan dan minimnya pemahaman warga tentang kanal resmi pengecekan status/aduan. Transparansi karenanya perlu multikanal: papan informasi wajib di kelurahan; *hotline/WhatsApp bot* berbahasa sederhana; templat pengumuman jadwal pencairan; serta FAQ singkat tentang hak dan kewajiban penerima. Ini mendorong *social accountability* yang inklusif, alih-alih sekadar kepatuhan administratif.
  - b) Kanal aduan: “*no wrong door*”.
 

Bagi lansia dan kelompok rentan, kanal daring sering bukan opsi pertama. Prinsip “*no wrong door*” memastikan setiap pintu masuk (RT/RW, kelurahan, pendamping, hotline) memiliki prosedur standar pencatatan dan *escalation*. Publikasi bulanan ringkas (jumlah aduan, kategori masalah, waktu penyelesaian) memperkuat kepercayaan dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan.
- 3) Membaca distribusi KPM: implikasi desain program
 

Distribusi 11.034 KPM (BPNT 6.112; PKH 4.922) menegaskan cakupan BPNT > PKH di seluruh kecamatan (rasio  $\pm 1,2-1,3$ ). Kontribusi terbesar berada di Bacukiki Barat (35,4%), disusul Soreang (32,5%); variasi antar-kelurahan lebar (misal Bukit Harapan 1.152 vs Mallusetasi 55). Pola ini konsisten dengan mandat program: BPNT yang lebih luas (ketahanan pangan) berbanding PKH yang bersyarat. Kebijakan komunikasi dan penjadwalan pencairan semestinya menyesuaikan profil beban layanan di kelurahan “padat KPM” untuk mencegah antrian, kebingungan, dan *idle time* petugas.
- 4) Faktor pendukung & penghambat: apa yang bekerja, apa yang tersendat
 

Yang bekerja: perangkat perencanaan (RPJMD/RKPD/Renja) memberikan disiplin awal; SIKS-NG memudahkan integrasi dokumen dan *monitoring*; musyawarah kelurahan membuka ruang validasi sosial. Yang tersendat: integrasi data pusat-daerah yang belum mulus, keterbatasan SDM verifikasi, birokrasi pencairan, dan sosialisasi yang belum merata. Artinya, Parepare telah memiliki struktur namun memerlukan kapasitas operasional dan komunikasi publik yang lebih tajam.
- 5) Implikasi lintas ranah
  - a. Kehidupan masyarakat. Kepastian jadwal dan kepastian status mengurangi *uncertainty* rumah tangga miskin; perbaikan kanal aduan mengurangi *transaction cost* (waktu/biaya) untuk mendapatkan hak.
  - b. Teknologi & data. Penguatan data *governance versioning* data KPM, data audit triwulanan, *exception report* otomatis mengubah sistem dari sekadar *registry* menjadi alat kendali penyaluran. Integrasi sederhana dengan *dashboard* kelurahan memberi visibilitas *real-time* bagi pelaksana.
  - c. Sosial & partisipasi. Transparansi yang proaktif (papan informasi, open data agregat, publikasi statistik aduan) memperluas ruang kontrol warga dan mencegah stigma sosial akibat tertutupan daftar penerima.
  - d. Pendidikan & literasi. *Clinic day* bulanan di kelurahan (pendampingan akses SIKS-NG/aduan) menaikkan literasi digital praktis; script komunikasi sederhana meminimalkan miskomunikasi petugas-warga.
- 6) Kontribusi studi dan kebaruan
 

Studi ini memberi tiga kontribusi praktis-ilmiah pada konteks kota menengah:

  - a. Bukti lapangan bahwa mutu data adalah variabel penentu efektivitas, setara pentingnya dengan besaran anggaran;

- b. Operasionalisasi transparansi yang menekankan akses bermakna—bukan hanya ketersediaan kanal digital;
  - c. Rangka perbaikan berjenjang (perbaikan cepat vs reformasi struktural) yang dapat direplikasi.
- 7) Rekomendasi kebijakan diringkas sebagai jembatan ke bagian Kesimpulan

**Tabel 1. Peta masalah akar intervensi prioritas (ringkas)**

Masalah kunci	Akar persoalan	Intervensi prioritas	Hasil yang diharapkan
Mismatch data KPM	Pemutakhiran tak serempak; verifikasi administratif	Community verification triwulanan; spot-check acak; data audit	Peningkatan ketepatan sasaran
Keterlambatan pencairan	Sinkronisasi data & proses bank	SLA dengan bank; cut-off sinkronisasi; checklist pra-pencairan	Ketepatan waktu meningkat
Variasi dokumen & bukti	Standar dokumentasi belum seragam	Control list & three-way matching; arsip digital bukti	Jejak audit kuat; sengketa turun
Transparansi belum inklusif	Literasi/akses warga beragam	Papan info wajib; hotline/WA bot; FAQ sederhana	Akses informasi merata
Kanal aduan kurang efektif	Proses tidak terpadu	Prinsip no wrong door; publikasi statistik aduan	Respons cepat & akuntabel

- 8) Keterbatasan dan agenda tindak lanjut
- Pembahasan ini bertumpu pada satu kasus kelembagaan (Dinas Sosial Kota Parepare) dengan horizon waktu terbatas. Ke depan, perluasan unit analisis (lintas kota/ kabupaten) dan pengukuran *before-after* pasca-intervensi (misal setelah penerapan SLA & open data minimal) akan memperkaya generalisasi temuan dan menguji efektivitas resep kebijakan yang diusulkan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan utama sebagai berikut.

- [1] Ketidaktepatan sasaran masih terjadi akibat validasi data yang belum merata dan pemutakhiran DTKS yang tidak serempak, sehingga terdapat penerima yang seharusnya memenuhi syarat namun belum terdaftar, maupun sebaliknya.
- [2] Keterlambatan pencairan dipicu oleh proses sinkronisasi data dengan pihak perbankan yang belum terstandarisasi, serta koordinasi lintas lembaga yang belum berjalan optimal.
- [3] Kelengkapan dokumen yang tidak konsisten berdampak pada akurasi jumlah bantuan dan memperlemah jejak audit, sehingga diperlukan standardisasi prosedur dokumentasi secara menyeluruh.
- [4] Adopsi SIKS-NG belum otomatis menghasilkan transparansi yang inklusif karena akses informasi publik dan tingkat literasi digital warga penerima berbeda-beda antar kelurahan, sehingga dibutuhkan kanal informasi multichannel yang lebih terjangkau.
- [5] Distribusi penerima yang tidak merata menimbulkan beban layanan yang timpang di beberapa wilayah, membutuhkan penyesuaian kapasitas sumber daya dan penjadwalan layanan sesuai kepadatan KPM per kecamatan.

Temuan-temuan tersebut secara keseluruhan menegaskan pentingnya tiga tuas perbaikan utama: (1) penguatan tata kelola data berbasis data governance, (2) koordinasi operasional lintas pihak yang lebih terstandarisasi, dan (3) transparansi publik yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan penerima manfaat.

### Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa langkah operasional disarankan untuk memperbaiki tata kelola bansos. Pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan verifikasi komunitas dan *spotcheck* lapangan agar sasaran lebih akurat. Mekanisme Service Level Agreement (SLA) dengan bank disertai cut-off sinkronisasi perlu ditetapkan untuk mengurangi keterlambatan pencairan. Standardisasi dokumen melalui daftar kontrol dan sistem *three-way matching* akan membantu memperkuat jejak audit serta akurasi penyaluran. Dari sisi transparansi, dibutuhkan kanal informasi yang beragam seperti papan pengumuman di kelurahan, hotline atau bot WhatsApp, FAQ sederhana, dan kanal pengaduan berbasis prinsip *no wrong door*. Terakhir, distribusi sumber daya dan jadwal pelayanan sebaiknya disesuaikan dengan kepadatan jumlah

KPM di tiap wilayah, agar beban layanan tidak menumpuk di satu kecamatan saja.

Penelitian berikutnya dapat mengembangkan temuan ini melalui pendekatan lintas daerah untuk membandingkan praktik pengelolaan bansos di kota/kabupaten lain, sehingga dapat ditemukan pola faktor keberhasilan yang lebih umum. Evaluasi longitudinal atau *before after study* juga penting dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan SLA, open data, maupun kanal pengaduan publik setelah benar-benar diberlakukan. Selain itu, penelitian kuantitatif dengan model statistik dapat digunakan untuk menguji secara empiris hubungan antara kualitas data, koordinasi, dan ketepatan pencairan. Kajian tentang literasi digital penerima bansos juga relevan untuk mengukur sejauh mana keterbatasan akses informasi mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas. Tidak kalah penting, analisis mengenai beban kerja aparatur kelurahan akibat distribusi penerima yang tidak merata dapat memberi gambaran dampak tata kelola terhadap kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Parepare. (2023, 13 November). Profil kemiskinan Kota Parepare Maret 2023.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022). Peraturan BRIN No. 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Anggaran perlindungan sosial APBN 2023 (Rp479,1 triliun).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, Maret). Penjelasan Menkeu tentang anggaran perlinsos 2024 (Rp496,8 triliun).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025, 10 Juni). Permensos No. 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN (mencabut Permensos 3/2021).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (n.d.). Aplikasi SIKS-Next Generation (laman akses).
- Kiger, M. E., & Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131. *Medical Teacher*, 42(8), 846–854. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1755030>
- O'Connor, C., & Joffe, H. (2020). Intercoder reliability in qualitative research: Debates and practical guidelines. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406919899220>
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE.
- Sekretariat Kabinet RI. (2025, Juni). Penyaluran bansos triwulan II menggunakan DTSEN.
- Thomas, G. (2021). *How to do your case study* (3rd ed.). SAGE.
- Transparency International Indonesia dkk. (2021). Bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19: Analisis persoalan dan rekomendasi kebijakan. *Modernization Era. Indigenous Agriculture*, 1(2), 67-78. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/ia/article/view/27369>
- Rahim, A. (2019). *Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Al Himayah*. 3(1), 29-52
- Rahmatullah, R., Tarawiru, Y., & Harun, H. (2024). TINGKAT LITERASI KEUANGAN PENGELOLA BUMDES DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA BUMDES DESA ROSOAN KABUPATEN ENREKANG. *Journal AK-99*, 4(2), 514-527
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV